

**PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI  
DALAM EKONOMI ISLAM**

**PARADIGM OF INTEGRATION-INTERCONNECTION  
IN ISLAMIC ECONOMY**

**Ali Muhayatsyah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe  
[muhayatsyah@gmail.com](mailto:muhayatsyah@gmail.com)

**Yoesrizal M Yoesoef**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe  
[yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id)

***Abstract***

*The process of Islamization is a methodological problem. Methodologically economics (social science) has a dependence on natural science. In other terms Islamic economic methodology is consultative and dynamic in order to produce transcendent knowledge supported by empirical and rational truths, as well as the main truths originating from God. The integration-interconnection paradigm is essentially that Islamic Economics should be inherent and not desirable because it can be integrated and interconnected with various scientific fields. Integration is done by making the Qur'an and hadith the grand theory of knowledge. Integration referred to here is related to efforts to integrate economic science with Islam without having to eliminate the uniqueness between the two sciences.*

*Keywords: Integration, Interconnection, Islamic Economics.*

**A. Pendahuluan**

**B**erbicara tentang ekonomi Islam, perhatian biasanya tertuju pada bank Islam, atau di Indonesia disebut bank syariah, hal ini tidak sepenuhnya salah, namun demikian juga tidak sepenuhnya benar. Ekonomi Islam tidak hanya tentang bank Islam, namun, bank Islam saat ini merupakan pintu gerbang untuk mengembangkan ekonomi Islam. (Rifai, 2007: 3)

Diantara sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia hanya satu yang dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi tahun 1997 yang menerpa bangsa Indonesia yaitu, Bank Mu'amalat. Bercermin kepada keberhasilan Bank Mu'amalat tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi Islam yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Menyikapi perkembangan yang cukup menggembirakan itu, pihak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, mencoba melakukan terobosan baru dengan mendirikan jurusan Ekonomi Islam. Fenomena tersebut menegaskan bahwa agenda tersebut tidak hanya wacana belaka, tetapi merupakan aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada dataran keilmuan, paradigma dan metodologi ekonomi Islam dinilai tidak jelas sehingga keberadaannya dianggap tertutup dan masih sering dipertanyakan. Selama ini, pemikiran dalam ekonomi Islam didominasi oleh mazhab *mainstream* yang dipelopori oleh Umar Chapra dan M.A. Mannan, dkk (Karim, 2002: 14). Secara garis besar, dapat dikatakan pemikiran kelompok ini berlandaskan pada paradigma islamisasi pengetahuan. Konsekuensinya, ekonomi Islam sering diakui sebagai produk dan tidak bisa lepas dari proyek cukup ambisius ini. Tujuan agenda besar ini adalah mengislamkan seluruh pengetahuan yang selama ini dikuasai oleh pemikiran sekuler Barat, termasuk didalamnya ilmu Ekonomi menjadi Ekonomi Islam. Gerakan intelektual internasional ini sebagai sebuah usaha untuk mendorong agar umat Islam tidak begitu saja meniru metodologi dari luar dengan mengabaikan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai Islam. Dengan landasan pemikiran *mainstream*, akhirnya keilmuan ekonomi Islam banyak dikembangkan oleh pihak-pihak yang secara intelektual memang sepeham dengan arah pemikiran yang demikian. (Azmy, 2008: 94)

Wacana integrasi-interkoneksi telah menjadi ajang diskusi dalam sejumlah seminar dan lokakarya yang diselenggarakan berkali-kali oleh baik tingkat universitas maupun fakultas, terutama pada perguruan tinggi Islam. Wacana tersebut menjadi menarik karena hingga saat ini hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan masih ibarat dua jalur yang antara satu sama lain belum menemukan titik perjumpaan. Keterpisahan antara dua disiplin itu

lalu menciptakan suatu justifikasi yang sesat bagi masyarakat, bahwa keduanya memang tidak pernah dan tidak akan bertemu sampai kapanpun. Menurut (Abdullah, 2010: Viii), asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan dan bertegur sapa antar berbagai disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerjasama antar berbagai disiplin ilmu akan menjadikan *narrowmindedness* (pola pikir yang amat sempit dan menyempitkan bagi yang lain).

Pendefinisian ilmu Ekonomi Islam oleh para intelektual Islam telah bersepakat bahwa ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang sesuai dengan syari'ah Islam, lalu jika begitu akan muncul pertanyaan yang dipakai mazhab apa, tafsirnya milik siapa, dan pertanyaan sejenisnya. Tulisan ini tidak membahas masalah tersebut, karena ilmu ekonomi Islam jelas berbeda dengan *Ilmu Fiqh* dan pembahasan mengenai hal itu tidak akan melahirkan sebuah jawaban. Ilmu ekonomi Islam berdiri atas paradigma yang khas. Paradigma itu mencakup al-Qur'an dan hadits beserta sebab-sebab turunnya ditambah dengan rasionalitas dan penelitian empiris yang terus bergerak dinamis dari teks ke konteks atau arah sebaliknya dari konteks ke teks. Paradigma itu tentu saja harus dalam koridor *maqashidus syari'ah*. Tetapi muncul kesulitan yang dialami ketika mencoba merumuskan teori ekonomi Islam. Hal ini yang sering dikritik, bahwa mengapa jika paradigmanya dengan asumsi-asumsi ekonomi yang berbeda tetapi teorinya masih sama.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka penulis mencoba menawarkan pendekatan melalui paradigma integrasi-interkoneksi dalam mencari suatu gagasan mengenai ekonomi Islam, baik itu pada tataran masalah epistemologi dan sifat dasar dari ilmu pengetahuan tersebut (obyek formal maupun obyek material dalam ekonomi Islam), sehingga menemukan suatu gagasan yang jelas tentang posisi ilmu Ekonomi Islam.

## **B. Pendekatan Keilmuan Berbasis Integrasi-Interkoneksi**

Islam dan umat Islam sebagai faktor utama penyebab kemajuan peradaban manusia adalah sebuah kenyataan sejarah, meski juga keterbelakangan dan kelemahan yang melanda umat Islam dewasa ini juga tidak bisa kita pungkiri. Upaya membangkitkan kembali peradaban Islam dipenuhi dengan berbagai wacana, Amin Abdullah menyorotinya dari segi keilmuan keagamaan di mana ia melihat tradisi keilmuan Islam tidak kunjung memberi pencerahan, ia berpendapat perlu adanya reformasi dalam metode pengkajian Islam. Amin melihat bahwasannya kemandulan Islam lebih disebabkan oleh tercerainya teks-teks keislaman dengan konteks sosial, di mana corak yang populer digunakan dalam pengkajian Islam adalah corak yang dikotomis dan atomistik, oleh karena itu corak pengkajian seperti ini harus dirubah dengan corak pengkajian yang integrasi-interkoneksi melibatkan multidisiplin keilmuan (Bagir, 2005: 234). Jadi nuansanya adalah reintegrasi keilmuan atau penyatuan kembali atau yang dapat pula diartikan upaya menerima masukan dari berbagai sisi keilmuan, menerima keberadaan entitas lain dari ilmu yang sebenarnya berkaitan erat dengan ilmu keislaman lalu mengintegrasikannya menjadi formula yang efektif mengurai benang kusut berbagai masalah kekinian.

Paradigma interaksi-interkoneksi hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antar berbagai bidang keilmuan "Ekonomi Islam" tersebut sebenarnya saling memiliki keterkaitan, karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan tersebut adalah realitas alam semesta yang sama, hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin berbeda. Oleh karena itu, rasa superior, eksklusifitas, pemilahan secara dikotomis terhadap bidang-bidang keilmuan yang dimaksud hanya akan merugikan diri sendiri, baik secara psikologis maupun secara ilmiah akademis. Betapapun setiap orang ingin memiliki pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif, bukannya pemahaman yang parsial dan reduktif. Maka dengan menimbang asumsi ini seorang ilmuan perlu memiliki visi integrasi-interkoneksi. Mengkaji satu bidang keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan lainnya itulah integrasi dan melihat kesaling-terkaitan antar berbagai disiplin ilmu itulah interkoneksi.

### 1. Bangunan Epistemologis Keilmuan Integratif-Interkonektif

Pada dasarnya ilmu pengetahuan manusia secara umum hanya dapat dikategorikan menjadi tiga wilayah pokok, yakni *natural sciences*, *social sciences* dan *humanities*. *Ketiganya tidak* berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya. *Ketiganya juga* akan menjadi semakin cair meski tidak akan menyatukan ketiganya, tetapi paling tidak akan ada lagi superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, tidak ada lagi klaim kebenaran ilmu pengetahuan sehingga dengan paradigma ini para ilmuwan yang menekuni keilmuan ini juga akan mempunyai sikap dan cara berfikir yang berbeda dari sebelumnya. (Abdullah, 2010: 370)

Dalam membentuk pola keilmuan yang integratif-interkoneksi harus menggunakan pertimbangan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut, yaitu *hadarah al-nash*, *hadarah al-ilm*, dan *hadarah al-falsafah*. *Hadarah al-nash* (*penyangga budaya teks-bayani*), memang tidak bisa lagi berdiri sendiri, terlepas sama sekali dari *hadarah al-ilm* (teknik, komunikasi) dan juga tidak terlepas dari *hadarah al-falsafah* (etika) dan begitu sebaliknya. *Hadarah al-ilm* (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan sains dan teknologi, akan tidak punya karakter, yang berpihak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh *hadarah al-falsafah* (budaya etik-emanisparotis) yang kokoh. Sementara itu, *hadarah al-nash* (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) dalam kombinasinya dengan *hadarah al-ilm* (sains dan teknologi), tanpa mengenal *humanities* kontemporer sedikit pun juga berbahaya, karena jika tidak hati-hati akan mudah terbawa arus ke arah gerakan *radikalism-fundamentalism*. Untuk itu, diperlukan *hadarah al-falsafah* (etik yang bersifat *transformatif-liberatif*). Begitu juga *hadarah al-falsafah* (budaya filsafat) akan terasa kering, jika tidak terkait dengan isu-isu keagamaan yang termuat dalam budaya teks dan lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh *hadarah al-ilm* (budaya ilmu-ilmu empiris-teknis). (Abdullah, 2010: 402-403)

Paradigma integratif-interkonektif ini terlihat sangat dipengaruhi oleh Abid al-Jabiry yang membagi epistemologi Islam menjadi tiga, yakni

epistemologi *bayani*, *burhani* dan *irfani*.<sup>1</sup> Abid al-Jabiry melihat epistemologi *irfani* tidak penting dalam perkembangan pemikiran Islam, bagi Amin Abdullah ketiga epistemologi seharusnya bisa berdialog dan berjalan beriringan. Selama ini epistemologi *bayani* lebih banyak mendominasi dan bersifat hegemonik sehingga sulit untuk berdialog dengan tradisi epistemologi *irfani* dan *burhani*, pola pikir *bayani* ini akan berkembang jika melakukan dialog, mampu memahami dan mengambil manfaat sisi-sisi fundamental yang dimiliki oleh pola pikir *irfani* dan *burhani*. (Abdullah, 2010: 374)

Menurut (Kuntowijoyo, 2006: 55) menyatakan bahwa inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticisme*). Model integrasi adalah menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai *grand theory* pengetahuan, sehingga ayat-ayat *qauliyah* dan *qauniyah* dapat dipakai (Suprayogo, 2005: 225). Integrasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan-keunikan antara dua keilmuan tersebut.

Untuk memahami hubungan antara agama dan ekonomi, orang harus memperelajari cakupan-cakupan dan bidang kerjanya masing-masing, dan meneliti apakah keduanya saling bertumpang tindih dan (bila ada) dalam aspek apa. Beberapa agama melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minum semata. Namun sebaliknya, Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan, tujuan dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip yang dimaksudkan, untuk lebih

---

<sup>1</sup>Epistemologi *Bayani* yang bersumber pada teks (wahyu) yang didukung pola pikir fikih dan kalam, *Bayani* selalu mencurigai akal pikiran karena dianggap akan menjauhi kebenaran tekstual. Epistemologi *Burhani* yang bersumber pada akal dan rasio. Epistemologi *Irfani* yang bersumber pada pengalaman (*experience*). Lebih lanjut tentang ketiga epistemologi ini lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Araby*, (Beirut: al-Markaz al-Taḥafy al-'Araby, 1990), *Bunyah al-'Aql al-'Araby: Dirasat Tahliyah Naqdiyyah li Nazm al-Ma'rifah fi al-Saqifah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1990).

mendekatkan tujuan sistem tersebut merupakan landasan sistem yang bisa di uji. (Kahf, 1995: 5)

Suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti itu seharusnya ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya seharusnya dijelaskan agar dapat menunjukkan kemurnian dan aplikabilitasnya. Namun perbedaan yang nyata seharusnya ditarik antara sistem ekonomi Islam dan setiap tatanan yang bersumber padanya. Dalam literatur Islam mengenai ekonomi, sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah ini. Sebagai akibatnya, beberapa buku yang dikatakan membahas “Sistem Ekonomi Islam” sebenarnya hanya berbicara tentang latar belakang hukumnya saja, atau kadang kadang disertai dengan beberapa prinsip ekonomi dalam Islam. Kajian mengenai prinsip-prinsip ekonomi itu hanya sedikit menyinggung mengenai kajian sistem ekonomi. (Kahf, 1995: 6)

Pengkajian ekonomi Islam selama ini harus memiliki corak yang berbeda dengan memadukan berbagai pendekatan yang (normatifik-positifik) berkaitan dengan keilmuan tersebut, artinya ilmu Ekonomi Islam harus memberikan pembedaan antara bagian hukum (*fiqh*) Islam yang membahas hukum dagang (*Fiqh Muamalat*) dan ekonomi. Selama ini Ekonomi Islam cenderung dibatasi oleh Hukum Dagang Islam, tetapi ini bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi itu. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan mempunyai banyak pengaruh terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya. Ketika tidak adanya pembedaan antara Fiqh Muamalat dan Ekonomi Islam berarti merupakan sumber lain dari kesalahan konsep dalam literatur mengenai Ekonomi Islam. (Kahf, 1995: 6)

Selain itu perlu adanya pengkajian sejarah dalam ekonomi Islam sendiri karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Ekonomi sebagai ilmu sosial, perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka jauh dalam berbagai perubahan ekonominya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah

unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan Ilmu Ekonomi. (Kahf, 1995: 7)

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi kontemporer, di satu pihak, dan di lain pihak, akan memberi kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya. (Kahf, 1995: 8)

### **C. Rancangan Paradigma Baru dalam Ekonomi Islam**

#### **1. Epistemologi Ekonomi Islam**

Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah.

Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.

Ada beberapa perbedaan antara epistemologi Islam dengan epistemologi pada umumnya. Pada garis besarnya, perbedaan itu terletak pada masalah yang bersangkutan dengan sumber pengetahuan dalam Islam, yakni wahyu dan ilham. Sedangkan masalah kebenaran epistemologi pada umumnya menganggap kebenaran hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran.

Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional tersebut. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah ujung dari kebenaran. Sumber ilmu pembentukan ekonomi Islam menurut M Akram Khan, adalah: Al-Qur'an; hadits; hukum Islam dan yurisprudensinya (Ijtihad); sejarah peradaban umat Islam, berbagai data yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi.

Sementara itu Masudul Alam Chowdhury, merumuskan metodologi ekonomi Islam dengan istilah *shuratic process*. Penggunaan istilah *shuratic* untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.

Menurut Chowdhury, sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah al-Qur'an, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu hadits juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. al-Qur'an dan hadits kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode *epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-

prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.

Selanjutnya dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu *ijtihad istimbathi* dan *ijtihad tathbiqi*. *Ijtihad istimbathi* bersifat deduksi, sedangkan *ijtihad tathbiqi* bersifat induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi kepada dua, yaitu *ijtihad fardi* (individu) dan ijtihad *jama'i* (kumpulan orang banyak). Ijtihad yang dilakukan secara bersama disebut *ijma'i* dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi. Dalam membicarakan epistemologi ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. *Ijtihad tathbiqi* yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan hadits dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya *shuratic* proses ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*). (Agustianto, 2011)

## 2. Pendekatan Ekonomi Islam

Menurut (Mannan, 1997: 19) ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kaitannya dengan sosiologi adalah jika sosiologi merupakan induk maka ilmu ekonomi Islam merupakan bagian darinya, meskipun dalam arti yang terbatas, karena dalam ilmu ini tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat, tetapi mengenai individu yang meyakini nilai-nilai Islam saja.

Dari uraian di atas nampak eksklusifan Mannan dalam membatasi peran ekonomi Islam yang hanya untuk umat Islam saja, tidak ada gagasan yang segar agar bagaimana praktek ilmu Ekonomi Islam ini dikembangkan sayapnya ke daerah non-muslim, dalam kerangka ini cukup dengan memasukkan ruh Islam, yaitu nilai-nilai etika Islam ke dalam konsep dan

praktek institusional ekonomi konvensional. Nilai-nilai *moral-ethics* inilah yang kemudian akan menjadi unsur pembeda dengan sistem ekonomi yang lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, meskipun pada dasarnya dalam kerangka operasionalnya semua sistem ekonomi itu menerapkan ilmu-ilmu bantu (dasar) ekonomi yang sama, sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian dalam wujud konkretnya, sistem nilai etika ini dijadikan ruh bagi semua instrumennya yang pada akhirnya akan membentuk karakter tipikal yang membedakan dengan sistem-sistem ekonomi lainnya. (Mughits, 2007: 7-8)

Meskipun kajian etika ekonomi ini masuk dalam wilayah aksiologi namun penting diikutsertakan dalam kajian epistemologi ini sebagai faktor pendukung dalam pencarian keabsahan eksistensi disiplin ilmu ekonomi Islam ini. Menurut ekonomi Islam bahwa antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktis (bisnis) harus dipahami dalam pengertian integratif, tidak secara parsial. Hal ini tentunya berbeda dengan aksioma kapitalis bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) itu mempunyai tujuan ekonomis, yakni keuntungan materil, sehingga keuntungan menjadi ideologinya dalam berbisnis, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai *moral-ethich* (Mughits, 2007: 8). Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai etika yang dimaksud seperti kesatuan (*unity*), *equilibrium* (keseimbangan atau keadilan),<sup>2</sup> kebebasan yang terbatas pada hak orang lain, pertanggungjawaban,<sup>3</sup> kebajikan dan kejujuran.<sup>4</sup>

Asas Ekonomi Islam mengacu pada al-Qur'an dan hadits. Perkara-perkara asas muamalat dijelaskan didalamnya dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Menurut (Rifai, 2007: 9) ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung untuk kepentingan apa dan siapa.

---

<sup>2</sup>Prinsip tersebut ditegaskan dalam Q.S. 2: 195; 25: 67-68, 72-73; 17: 35 dan; 59: 7.

<sup>3</sup>Q.S. 4: 85.

<sup>4</sup>Q.S. 5:1; 6: 152; 16: 91; 17: 34-35; 7: 85; 11: 85 dan 26: 181-183.

Dalam (Naqvi, 2003: 19) menyebutkan, ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam, dan yang menempatkan berbeda dengan ekonomi (neo-klasik) positif, adalah desakan untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etik yang didasarkan pada agama dalam suatu *framework* analisis yang terpadu. Tetapi, selain menetapkan validitas filosofis ide ini dari sudut pandang Islam, ia setidaknya harus memiliki kemungkinan untuk dihubungkan dengan situasi-situasi kehidupan riil agar bisa memberikan klaim validitas objektif atas pernyataan-pernyataan spesifik tentang ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena pernyataan-pernyataan demikian itu, baik dari keputusan nilai maupun faktual, dapat dibuktikan sejalan dengan “fakta-fakta” yang ada dalam masyarakat muslim. Untuk tujuan ini, diperkenalkan dua konsep kunci, yakni konsep kehadiran Tuhan dan masyarakat muslim yang hidup-riil (berbeda dengan masyarakat Islam yang ideal). Kedua konsep ini pada dasarnya merupakan proporsi empiris dalam arti bahwa secara faktual dapat dibuktikan sebagai benar atau salah.

Terkait penjelasan di atas, (Suharto, 2005: 42-53) menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi Islam dan pelaksanaannya. Teori-teori ekonomi konvensional, baik yang mikro maupun makro, akan tetap terpakai dalam diskursus ekonomi Islam. Dalam melakukan proses islamisasi ekonomi perlu mengambil tiga bentuk pendekatan yang adil terhadap ekonomi konvensional. Adapun pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan menolak (*negation*). Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam.
- b. Pendekatan memadukan (*integration*). Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam. Karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi.

- c. Pendekatan menambah nilai (*value addition*). Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pada tataran ini peranan islamisasi ekonomi adalah dengan memasukkan nilai-nilai khusus Islam yang tidak ada pada ekonomi konvensional.

#### **D. Kritik Atas Pola Islamisasi Ekonomi Islam**

Ada dua kelompok berpandangan bahwa ilmu agama dan ilmu umum adalah entitas berbeda yang tidak dapat dipertemukan, kelompok lain berpandangan bahwa kedua ilmu ini tidak boleh dipisahkan. Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Fazlur Rahman, dan Ziauddin Sardar. mempunyai kecenderungan pada kelompok kedua, yaitu islamisasi ilmu pengetahuan.

Menurut Ismail Raji al-Faruqi islamisasi pengetahuan adalah menyusun dan membangun ulang ilmu pengetahuan modern dengan memberi dasar Islam dengan cara memberikan definisi baru, mengevaluasi kembali data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan dan memroyeksikan tujuan yang konsisten dengan Islam.

Gagasan islamisasi ilmu ini sebenarnya cukup menarik untuk dikritisi ulang dan dikembangkan wawasan dan kawasannya di saat kita telah memasuki era globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Islamisasi pengetahuan tidak memiliki landasan filosofi bagi pengembangannya. Sains yang kebenarannya relatif harus dipaksakan sebanding dengan suatu kebenaran *absolut*. Sains memiliki sifat universal dan tidak dibenarkan memaksakan kebenarannya. Jadi tidak benar bahwa ada sains Islam, yang benar adalah sains yang dipakai orang muslim atau sains yang merupakan produk orang yang memeluk agama Islam. Ilmu seharusnya inheren dengan Islam meskipun tanpa kata "islamisasi". Jika ilmu digunakan untuk tujuan destruktif, maka ia menjadi tidak islami. Sebaliknya, jika ilmu digunakan untuk kesejahteraan umat meskipun bukan orang Islam yang menggunakan, maka ia pun tetap islami.

Ide tersebut dinilai oleh beberapa ilmuan muslim memiliki fondasi yang tidak begitu kokoh, seperti Sardar (1987), Al-Attas, Kuntowijoyo (2004) dan lainnya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan integrasi ilmu dalam Islam. Ilmu-ilmu tersebut harus dapat dipahami secara konvergen dengan melakukan pendekatan *interdisipliner* agar dapat dipahami serta dapat mencari solusi kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. (Ahmad, 2010: 93-95)

Kritikan yang muncul atas proyek dan langkah Islamisasi Faruqi, adalah pada pengabaian realitas epistemologis Barat yang membangun dunia modern saat ini. Proyek Islamisasi Faruqi seakan tidak melihat kekuatan epistemologi Barat yang mendominasi seluruh lini pengetahuan yang telah berkembang saat ini. Sardar menegaskan bahwa yang paling penting sebelum dilakukan proses praktis seperti yang dilakukan dalam Islamisasi Faruqi adalah melakukan perubahan epistemologis Barat terlebih dahulu (Sardar 1987, 85-106). Kritik Al-Attas terhadap Islamisasi yang dilakukan Faruqi, seharusnya hanyalah pada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer saja, dan tidak melakukan rekonstruksi atas ilmu - yang disebutnya - *Turath Islamiyy*. Lebih jauh lagi proses Islamisasi harus melakukan dua langkah utama, yaitu proses verifikasi dan proses penyerapan yang harus memiliki batasan, terutama proses sintesis seperti yang merupakan pusat dari Islamisasi Faruqi, yaitu sintesa dapat dilakukan ketika konsep-konsep Barat telah disaring dan direduksi unsur-unsurnya. Yang paling penting, lanjut Al-Attas, Islamisasi Al Faruqi mengecilkan peran tassawuf. Bagi Al-Attas, tassawuf adalah cara yang harus pula dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman empirisme, pragmatisme, materialisme dan rasionalisme sempit yang merupakan sumber utama sains modern. Masuknya konsep tassawuf menurut Al-Attas akan memberikan arah yang benar pada kesatuan akal, jiwa, intuisi dan spiritualitas dalam proses Islamisasi (Hashim 2005). (Mulawarman, 2013: 7-8)

Persoalan Ekonomi Islam sebagai sebuah islamisasi pengetahuan masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah mengenai kedudukan pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan adalah kebudayaan atau muamalat yang menganut kaidah semua boleh kecuali yang

dilarang. Jika pengetahuan sudah menjadi egoistik dan melampaui batas, maka hilang statusnya sebagai sekedar muamalat. Bahkan kadang-kadang pengetahuan mengklaim sebagai kebenaran. Penyakit inilah yang mungkin menjangkiti pengembangan ekonomi Islam sehingga perlu diwaspadai oleh para ekonom muslim. Apabila proses islamisasi merujuk pada prosedur tentang peng-islaman ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya, sekalipun melalui mata-rantai proses yang amat panjang, maka islamisasi adalah sebuah kemestian yang tak dapat dapat ditunda. Sebaliknya bila islamisasi ternyata hanya akan lebih menempatkan Islam sebagai alat justifikasi atas praktek-praktek ekonomi yang ada, islamisasi tidak ada manfaatnya. Keduanya memiliki konsekuensi yang amat berbeda, dan keduanya juga memiliki kecenderungan bagi keberlangsungannya.

Menurut Kuntowijoyo, pengetahuan yang benar-benar objektif tidak perlu diislamkan, karena Islam mengakui objektifitas. Oleh karena itu, umat Islam harus pandai-pandai memilih mana yang perlu islamisasi mana yang tidak. Tidak ada kekhawatiran apapun dengan ilmu yang benar-benar objektif dan sejati.

Menindaklanjuti hal yang mendasar tersebut, kiranya dapat dipinjam langkah objektifikasinya Kuntowijoyo secara singkat dan sederhana untuk membuat pengembangan Ekonomi Islam lebih terbuka. Oleh (Kuntowijoyo, 2006: 60), Objektifikasi adalah penerjemahan atau konkretisasi nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Dalam konteks ini, suatu perbuatan itu dimasukkan objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-muslim sebagai sesuatu yang natural atau sewajarnya, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Walaupun dari sisi yang mempunyai perbuatan bisa tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan termasuk amal. Begitu juga sebaliknya.

Objektifikasi harus diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang tidak beriman bila tidak meninggalkan riba dapat diobjektifkan dengan sistem bagi hasil yang secara ekonomi lebih menguntungkan dan secara muamalat dibolehkan. Objektifikasi sendiri sesungguhnya berbeda dengan sekularisasi dan

objektifikasi pengetahuan Barat. Dengan strategi ini, diharapkan dari sisi epistemologi Ekonomi Islam menjadi semakin jelas dan dapat diterima oleh lebih banyak kalangan. (Azmy, 2008: 113)

#### **E. Peran Islam dalam Bidang Keilmuan Ekonomi Islam**

Ajaran Islam di bidang sosial termasuk yang paling menonjol karena seluruh ajaran Islam khusus dalam bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi tolong menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa dan kebersamaan. Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalat lebih besar dari pada urusan ibadah. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat.

Pandangan Islam mengenai kehidupan yang demikian itu, secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan dunia. Dalam kaitan ini, perlu dimiliki pandangan kosmologis (teori tentang asal) yang didasarkan pada pandangan teologi yang benar. Dalam teologi Islam, bahwa alam raya dengan segala isinya sebagai ladang untuk mencari kehidupan adalah sesuatu yang suci dalam arti tidak haram untuk dimanfaatkan. (Nata, 2008: 88-90)

Pandangan (Quraish, 1992: 41) mengatakan, membahas hubungan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula dengan menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah. Tetapi pembahasan hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian al-Qur'an dan sesuai pula dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak perlu melihat apakah di dalam al-Qur'an terdapat ilmu matematika, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu komputer dan lain-lain, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah satu ayat al-qur'an yang bertentangan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan.

Kuntowijoyo mengatakan bahwa al-Qur'an sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dinamakan paradigma al-Qur'an, paradigma Islam. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma al-Qur'an jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Kegiatan itu mungkin menjadi pendorong munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa premis-premis normatif al-Qur'an dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Struktur transendental al-Qur'an adalah sebuah ide normatif dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoretis. Ia akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis umat manusia sebagai khalifah di bumi. Itulah sebabnya pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam. (Kuntowijoyo, 2006: 25-26)

Menurut (Basyir, 1996: 140) Islam adalah agama yang sempurna dan integral, dan diharapkan berujung pada realisasi kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*. Bidang moralitas menduduki tempat yang cukup tinggi dalam ajaran Islam. Dalam arti luas, seluruh aspek ajaran Islam dapat dinilai sebagai ajaran akhlak, hal itu sesuai dengan pernyataan Nabi bahwasannya beliau diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hukum Allah dan rasul-Nya adalah hukum terbaik di antara hukum-hukum yang ada di dunia, karena telah sesuai dengan fitrah manusia. Umat Islam akan sejahtera dan bahagia jika dapat menerima kehadiran hukum Allah dan rasul-Nya dengan penuh rasa ikhlas. Beberapa ketentuan hukum Islam mendidik manusia bermoral luhur, beberapa ketentuan hukum Islam mempertahankan tegaknya moral luhur dan mencegah dekadensi moral, baik secara individu maupun kolektif.

#### **F. Kesimpulan**

Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian yang sempit, akan tetapi merupakan sebuah sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat ritual.

Paradigma integratif-interkoneksi secara konseptual memang sangat relevan bagi perkembangan keilmuan Islam, di mana dialog antar disiplin ilmu akan semakin memperkuat keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan zaman dengan segala kompleksitas yang ada.

Kegiatan ekonomi manusia menurut sistem dalam Islam merupakan salah satu bagian yang diatur dalam kegiatan muamalat. Akan tetapi, akidah, akhlak dan syari'ah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Hal inilah yang merupakan letak dari ke-universal-an Islam. Penerapan syari'ah Islam di bidang ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian integral dari penerapan syari'ah Islam di bidang-bidang lain. Oleh karena itulah maka salah satu tujuan pengembangan ekonomi dalam Islam yang ingin dicapai adalah transformasi masyarakat yang berbudaya islami. Nilai-nilai Islam harus "ter-internalisasi" dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, Islam menjadi budaya masyarakat. Lebih jelasnya, seluruh pihak yang terkait dengan perkembangan ilmu Ekonomi Islam harus mampu menampilkan Ekonomi Islam dengan terbuka sehingga mampu merealisasikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Agustianto, "Epistemologi Ekonomi Islam," <http://agustianto.niriah.com/2008/03/11/epistemologi-ekonomi-islam/>, akses 14 November 2011.
- Ahmadzahro, dkk, *Antologi Kajian Islam: Tinjauan Tentang Filasafat, Tasawuf, Institusi Pendidikan, Al-Qur'an, Hadits, Hukum dan Ekonomi Islam*, seri 16, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2010.
- Azmy, M. Showwam, "Ekonomi Islam Sebagai Ilmu Sosial Profetik (Meneropong Ekonomi Islam Lewat Pemikiran Kuntowijoyo)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)*, Volume.2.No.2, Juni 2008.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk, *Integrasi Ilmu dan Agama Intepretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cetakan IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, alih bahasa Machnun Husein, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, cetakan II, Jakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alihbahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mughits, Abdul, "Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)* Volume.1, No.2, Juni 2007.
- Mulawarman, Aji Dedi, "Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Volume. 1 No. 1, September 2013.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rifai, Veizal, "Akselerasi Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia," *Journal of Islamic Business and Economics*, Volume.1. No.1, Desember 2007.
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, cetakan I, Bandung: Mizan, 1992.
- Suharto, Ugi, "Paradigma Ekonomi Konvensional dalam Sosialisasi Ekonomi Islam," sebuah makalah yang disampaikan dalam Studium Generale Forum Studi Ekonomi Islam, UIN Sunan Kaliaga, April 2005.